



Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan

JAKARTA, KOMPAS — Tim evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri menemukan indikasi penggelembungan anggaran di dokumen RAPBD yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Indikasi penggelembungan anggaran yang disinyalir Gubernur permainan DPRD DKI Jakarta muncul dalam RAPBD yang disampaikan Gubernur. Namun, bisa saja Gubernur tidak tahu soal ini karena pembahasan RAPBD tidak semuanya langsung dengan Gubernur, tetapi dengan stafnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (10/3).

Tjahjo menolak menyebutkan mata anggaran yang terindikasi digelembungkan itu. Namun, diindikasikan besarnya lebih dari Rp 12 triliun. "Kami koreksi mata anggaran itu, minimal diberi catatan," tambahnya.

Dengan adanya temuan itu, dia menduga penyelundupan anggaran tidak hanya dilakukan oknum di DPRD, tetapi juga oknum di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Pembahasan (RAPBD DKI Jakarta), kan, berdua (pemerintah dan DPRD), jadi kemungkinan oknum yang bermain ada di dua tempat," katanya.

Tjahjo mendukung upaya penyelidikan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, oleh kepolisian. Kepolisian diharapkan bisa mengurai oknum-oknum yang memainkan APBD.

"Kejadian di DKI Jakarta ini sekaligus membuka mata agar tidak hanya DKI Jakarta, tetapi pemerintah daerah lainnya untuk lebih hati-hati saat menyusun anggaran," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pihaknya berupaya untuk sesegera mungkin menyelesaikan evaluasi RAPBD DKI Jakarta. Batas waktu yang diberikan sesuai undang-undang

jatuh pada 13 Maret 2015. Namun, pihaknya berupaya menyelesaikan sebelum batas waktu itu. Hal itu dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan di DKI Jakarta tidak terhambat.

Periksa pemenang lelang

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Jakarta. Salah satu yang diperiksa adalah para direktur pemenang tender pengadaan UPS.

Selasa kemarin, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan pemenang lelang. Namun, hingga kemarin siang baru satu orang yang datang memenuhi panggilan penyidik. "Lainnya masih kita tunggu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul.

Martinus menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam penganggaran dan pengadaan UPS bakal diperiksa, termasuk pihak DPRD DKI Jakarta. Kasus dugaan korupsi ini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, tetapi polisi belum mengungkap siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. "Tersangka belum ada," kata Martinus.

Meski demikian, Martinus mengatakan, polisi sudah mengantongi calon tersangka. Diduga terjadi korupsi dalam pengadaan UPS di sejumlah sekolah di DKI senilai Rp 5,8 miliar per unit. Harga itu dinilai tidak wajar.

Posyandu pun terimbas

Kisruh penetapan RAPBD DKI Jakarta berimbas hingga ke program pelayanan ke masyarakat, seperti posyandu, pengasapan nyamuk, dan sosialisasi kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan itu, puskesmas keca-

matan meminjam dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah dan memanfaatkan dana swadaya masyarakat.

Tini (55), penggerak posyandu di RW 010 Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Senin (9/3), mengatakan, porsi makanan bayi di posyandu dikurangi akibat anggaran APBD yang disalurkan melalui kelurahan belum cair.

Para pekerja kebersihan di kawasan Monumen Nasional, seperti Fatima (31), harus berutang lebih dari Rp 1,5 juta untuk menutup biaya hidup selama dua bulan lebih. "Itu baru utang di sekitar rumah. Ada lagi utang di tempat kerja," ujar ibu tiga anak itu, Senin (9/3) lalu.

(APA/RAY/DEA/ART)



Indikasi penggelembungan anggaran yang disinyalir Gubernur permainan DPRD DKI Jakarta muncul dalam RAPBD.

Tjahjo Kumolo